



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Studi atas QRIS sebagai Instrumen Diplomasi Ekonomi dan Inklusi Sosial di Asia Tenggara

Wike Rulita Harik^{1*}, Ahmad Sahide²

¹Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, wike.rulita.pc21@mail.ums.ac.id

²Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, ahmadsahide@umy.ac.id

*Corresponding Author: wike.rulita.pc21@mail.ums.ac.id

Abstract: *The digitalization of payment systems has become a key component of economic transformation across Asia. In Indonesia, the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) functions not only as an inclusive digital payment tool but also as a strategic instrument in advancing regional economic diplomacy. This study aims to analyze the social impact of QRIS, particularly in promoting financial inclusion among marginalized groups and micro, small, and medium enterprises (MSMEs), as well as its role in establishing cross-border cooperation in Southeast Asia. The method employed is descriptive qualitative, based on literature review and secondary data. The findings reveal that QRIS effectively reaches previously excluded groups from the formal financial system and supports regional cooperation frameworks through cross-border payment system interoperability. QRIS represents Indonesia's digital strength in building an inclusive, sovereign, and regionally integrated financial system.*

Keywords: QRIS, Social Inclusion, Economic Diplomacy

Abstrak: Digitalisasi sistem pembayaran telah menjadi elemen penting dalam transformasi ekonomi kawasan Asia. Di Indonesia, *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) tidak hanya berperan sebagai alat pembayaran digital yang inklusif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperluas diplomasi ekonomi regional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial QRIS, khususnya dalam konteks inklusi sosial kelompok marginal dan pelaku UMKM, serta mengkaji perannya dalam membangun kerja sama lintas batas di kawasan Asia Tenggara. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS mampu menjangkau kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan formal serta membentuk kerangka kerja sama regional melalui interoperabilitas sistem pembayaran lintas negara. QRIS menjadi simbol dari kekuatan digital Indonesia dalam membangun sistem keuangan yang inklusif, berdaulat, dan terintegrasi secara regional.

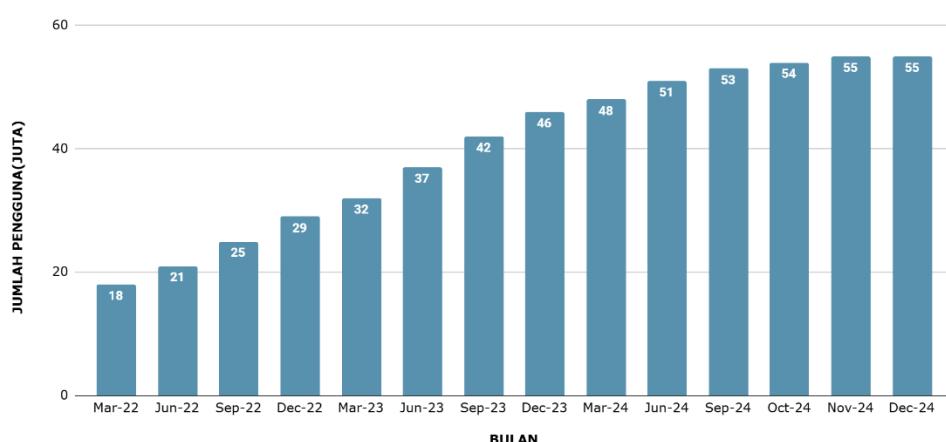
Kata Kunci: QRIS, Inklusi Sosial, Diplomasi Ekonomi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal sistem pembayaran (Fernando, et al., 2023). Di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara, transformasi digital di sektor keuangan menjadi salah satu fenomena yang paling signifikan dalam dua dekade terakhir. Digitalisasi sistem pembayaran tidak hanya mempermudah transaksi ekonomi, tetapi juga mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan institusi keuangan serta memperluas akses terhadap layanan keuangan yang sebelumnya tidak terjangkau oleh kelompok marginal. Hal ini terlihat dari maraknya penggunaan *e-wallet*, *mobile banking*, dan kode respons cepat (*Quick Response Code/QR code*) yang mulai mendominasi sistem pembayaran ritel di kawasan ini (Maharani, 2023). Inisiatif-inisiatif digital seperti *PromptPay* di Thailand, *PayNow* di Singapura, telah membuka jalan bagi penguatan ekosistem pembayaran digital yang inklusif dan efisien.

Dalam konteks Indonesia, kehadiran QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) menjadi tonggak penting dalam mendukung digitalisasi sistem pembayaran nasional. Diluncurkan secara resmi oleh Bank Indonesia pada tahun 2019, QRIS bertujuan untuk menyatukan berbagai kode QR dari penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) agar masyarakat hanya membutuhkan satu kode untuk semua transaksi digital (Hamid, et al., 2024). Selain meningkatkan efisiensi dan kenyamanan, QRIS juga menjadi simbol kedaulatan digital Indonesia di tengah dominasi platform asing dalam lanskap pembayaran digital. Per Mei 2024, jumlah merchant QRIS telah melampaui 30 juta dengan kontribusi signifikan dari pelaku UMKM (Bank Indonesia, 2024). Posisi QRIS sebagai produk digital nasional turut diperkuat dengan perluasan kerja sama lintas negara (cross-border QR code), seperti kolaborasi dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura, yang memperlihatkan potensi QRIS sebagai instrumen diplomasi ekonomi digital kawasan. Berikut ini adalah grafik jumlah pengguna QRIS di Indonesia tahun 2022-2024.

JUMLAH PENGGUNA QRIS DI INDONESIA TAHUN 2022 - 2024



Sumber: Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (**ASPI**)
Gambar 1. Jumlah Pengguna QRIS di Indonesia Tahun 2022-2024

Namun demikian, transformasi digital di sektor keuangan tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Salah satu isu utama adalah adanya kesenjangan keuangan (*financial gap*) yang masih lebar, terutama antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, antara negara-negara maju dan berkembang, serta antara pelaku ekonomi formal dan informal. Meskipun inklusi keuangan menjadi tujuan bersama, kenyataannya akses terhadap teknologi, literasi digital, serta infrastruktur pendukung belum merata. Fenomena ini memunculkan ketimpangan baru dalam bentuk *digital divide*, yang menghambat optimalisasi manfaat digitalisasi bagi seluruh lapisan

masyarakat (Albanjari, 2023). Selain itu, dalam konteks geopolitik dan perdagangan internasional, digitalisasi sistem pembayaran menjadi bagian dari arena baru dalam diplomasi ekonomi. Negara-negara mulai memanfaatkan inovasi digital sebagai alat untuk memperkuat posisi tawar, menegosiasikan kerja sama regional, hingga membentuk arsitektur keuangan baru yang lebih berimbang di luar dominasi dolar AS.

Dalam kerangka inilah, QRIS tidak hanya diposisikan sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan strategis yang menghubungkan kepentingan domestik dengan kepentingan luar negeri. Sebagaimana dijelaskan oleh Saleh dan Marzaman (2025), QRIS dan GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) menjadi manifestasi konkret dari kedaulatan digital Indonesia, khususnya dalam menghadapi tekanan dagang dari kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Fernando dan Turnip (2023) bahkan menekankan bahwa kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN 2023 memberikan peluang untuk mempromosikan penggunaan *local currency settlement* dan interoperabilitas QR code lintas batas sebagai bentuk soft power diplomasi digital regional.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial dari digitalisasi sistem pembayaran melalui studi atas QRIS sebagai instrumen diplomasi ekonomi dan inklusi sosial di Asia. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran QRIS dalam memperluas inklusi sosial dan keuangan di Indonesia dan Asia Tenggara? dan (2) Bagaimana QRIS digunakan sebagai instrumen diplomasi ekonomi dalam kerja sama regional Asia? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran ganda QRIS, tidak hanya sebagai teknologi finansial domestik, tetapi juga sebagai alat negosiasi politik-ekonomi dalam tatanan internasional.

Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada beberapa kerangka pikir utama. Pertama, yang menjelaskan bagaimana adopsi teknologi terjadi di masyarakat dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keunggulan relatif, kompatibilitas, dan kompleksitas. Kedua, konsep *financial inclusion* yang didefinisikan sebagai ketersediaan akses yang setara terhadap layanan keuangan formal, yang menjadi indikator penting pembangunan ekonomi berkelanjutan (Putri, et al., 2024). Ketiga, teori *soft power* yang menekankan bahwa kekuatan sebuah negara tidak selalu bersifat koersif, melainkan dapat berasal dari kemampuan memengaruhi melalui daya tarik budaya, kebijakan, dan nilai-nilai. Dalam konteks ini, QRIS diposisikan sebagai perpanjangan tangan dari kebijakan luar negeri Indonesia yang berbasis teknologi dan kerja sama multilateral.

Dalam konteks teori human security (UNDP, 1994), transformasi digital melalui sistem pembayaran digital seperti QRIS dapat berperan ganda. Di satu sisi, inovasi teknologi finansial ini mampu berkontribusi dalam memperkuat economic security bagi kelompok rentan dengan menyediakan akses yang lebih luas, murah, dan aman ke dalam sistem keuangan formal. QRIS mempermudah pelaku usaha mikro, perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat di wilayah 3T untuk melakukan transaksi tanpa harus terlibat dalam sistem tunai yang rawan pencurian, penipuan, dan biaya transaksi tinggi. Hal ini sekaligus memperkuat personal security karena masyarakat tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar yang berisiko terhadap keselamatan diri.

Dengan menggunakan pendekatan multidisipliner yang memadukan perspektif ekonomi, politik, hukum, dan teknologi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual bagi literatur mengenai diplomasi digital dan pembangunan sosial di kawasan Asia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena digitalisasi sistem pembayaran melalui studi atas QRIS sebagai instrumen diplomasi ekonomi dan inklusi sosial. Pendekatan ini dipilih karena mampu

menangkap kompleksitas makna, relasi, dan dinamika sosial-politik yang terkait dengan kebijakan dan implementasi teknologi pembayaran digital di kawasan Asia (Rukayyah, et al., 2024). Dalam beberapa bagian, pendekatan kualitatif ini diperkaya dengan elemen campuran untuk mendukung penafsiran yang lebih kontekstual terhadap data statistik sekunder.

Subjek kajian dalam penelitian ini mencakup lembaga-lembaga keuangan yang terlibat dalam penggunaan dan implementasi QRIS, masyarakat pengguna yang menjadi sasaran inklusi keuangan digital, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi motor utama adopsi QRIS di tingkat akar rumput. Fokus geografis penelitian diarahkan pada negara-negara Asia Tenggara, dengan penekanan khusus pada Indonesia sebagai pelopor dan pemilik sistem QRIS. Namun demikian, referensi lintas negara (cross-reference) dari negara lain seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura juga digunakan sebagai bahan banding untuk melihat dinamika regional dalam adopsi sistem pembayaran digital lintas batas.

Teknik pengumpulan data dilakukan sepenuhnya melalui data sekunder, mengingat sifat penelitian yang berbasis studi pustaka dan analisis dokumen. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga pemerintah seperti Bank Indonesia dan ASEAN Secretariat, publikasi media kredibel, serta dokumen kerja sama internasional yang berkaitan dengan sistem pembayaran digital dan diplomasi ekonomi. Peneliti juga mengkaji laporan hasil riset terdahulu yang relevan, serta melakukan telaah terhadap regulasi dan kebijakan nasional yang mengatur sistem pembayaran digital dan interoperabilitas lintas negara.

Proses analisis data dilakukan secara tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari kumpulan data sekunder, kemudian mengelompokkannya berdasarkan relevansi terhadap tujuan penelitian. Dalam beberapa bagian, analisis dilakukan menggunakan pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk menilai posisi strategis QRIS sebagai instrumen diplomasi digital Indonesia. Analisis ini membantu menggambarkan potensi, kendala, dan peluang yang melekat dalam implementasi sistem QRIS, baik di tingkat nasional maupun regional. Validitas data dijaga melalui proses triangulasi sumber, dengan membandingkan berbagai literatur dan dokumen dari sumber yang berbeda guna memperoleh gambaran yang utuh dan terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

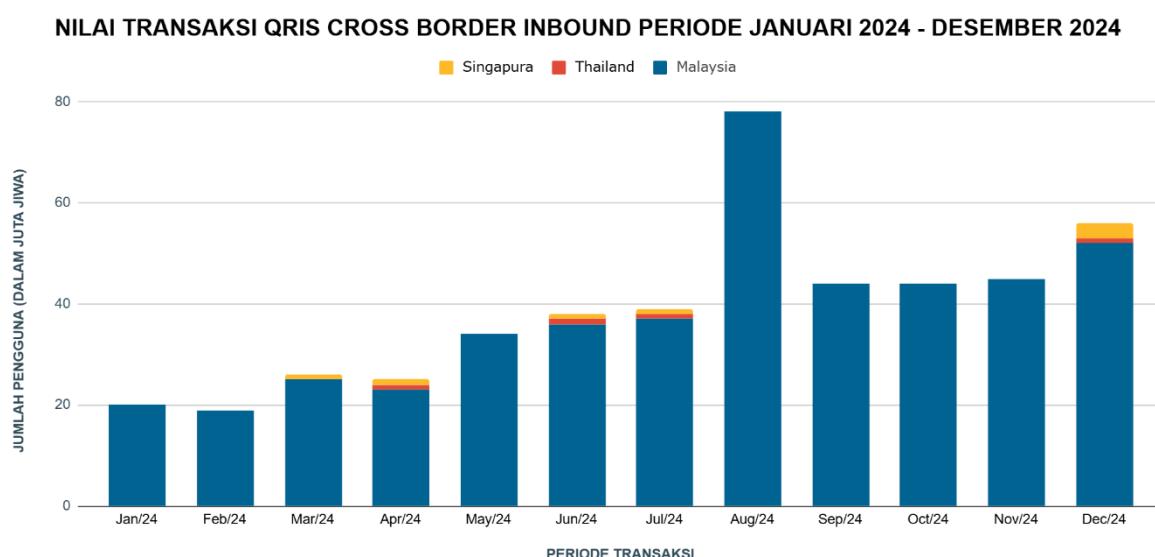
1. Perkembangan Adopsi QRIS di Asia dan Tren Sosial-Ekonomi

Adopsi sistem pembayaran digital berbasis QR code mengalami pertumbuhan pesat di kawasan Asia dalam lima tahun terakhir. Hal ini dipicu oleh meningkatnya penetrasi internet, penggunaan perangkat mobile, serta kebijakan pemerintah yang pro terhadap digitalisasi sektor keuangan (Afandi, et al., 2022). Di tengah arus transformasi tersebut, QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) muncul sebagai salah satu model nasional yang berhasil mencapai skala luas dalam waktu relatif singkat. Diluncurkan pada Agustus 2019 oleh Bank Indonesia, QRIS dirancang untuk menyatukan berbagai standar QR code yang sebelumnya terfragmentasi antar penyedia jasa pembayaran, menjadi satu sistem yang interoperabel di seluruh Indonesia (Saleh, et al., 2025).

Per Mei 2024, data Bank Indonesia mencatat bahwa jumlah merchant QRIS telah menembus angka 30,87 juta, dengan mayoritas pengguna berasal dari sektor UMKM. Selain itu, volume transaksi QRIS tumbuh secara eksponensial, mencapai nilai Rp27 triliun per bulan, menandakan bahwa sistem ini telah menjadi bagian integral dalam aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat Indonesia. Secara geografis, QRIS telah menjangkau hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia, memperlihatkan kapabilitiesnya sebagai alat pemerataan ekonomi digital. Program *Digitalisasi Daerah* yang digagas oleh pemerintah turut mempercepat proses adopsi, khususnya di sektor transportasi, pasar tradisional, dan tempat ibadah.

Tren serupa juga terlihat di negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Thailand melalui *PromptPay*, Malaysia dengan *DuitNow*, serta Singapura melalui *PayNow* telah mengembangkan sistem pembayaran berbasis QR code yang terintegrasi dengan sistem perbankan nasional (Saleh, et al., 2025). Namun yang membedakan QRIS adalah orientasinya yang tidak hanya bersifat domestik, melainkan juga didorong sebagai bagian dari kerangka kerja sama ekonomi regional. Melalui inisiatif cross-border QR payment, QRIS mulai digunakan dalam transaksi lintas negara, seperti dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura, di mana wisatawan Indonesia dapat melakukan pembayaran langsung melalui aplikasi dompet digital lokal berbasis QRIS.

Berikut ini adalah grafik nilai transaksi QRIS Cross border *Inbound* periode Januari 2024-Desember 2024 di Thailand, Malaysia, dan Singapura.



Sumber: Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (*ASPI*)

Gambar 2. Nilai Transaksi QRIS Cross Border Inbound Periode Januari 2024- Desember 2024

Adopsi QRIS dan sistem sejenis di Asia menunjukkan bahwa QR code bukan hanya alat transaksi, tetapi juga sarana untuk memperluas inklusi keuangan. Teknologi ini memungkinkan kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan formal seperti pelaku usaha informal, buruh harian, dan masyarakat pedesaan—untuk terlibat dalam ekonomi digital hanya dengan menggunakan ponsel pintar dan koneksi internet dasar. Secara sosiologis, hal ini menggeser pola konsumsi dan transaksi masyarakat ke arah yang lebih digital, efisien, dan terdokumentasi.

Namun demikian, tantangan tetap muncul, terutama dalam bentuk ketimpangan literasi digital dan infrastruktur yang belum merata di sebagian wilayah Asia. Di negara-negara dengan indeks pembangunan manusia (IPM) rendah, adopsi QR code payment masih terkonsentrasi di kota besar dan kelas menengah. Oleh karena itu, strategi adopsi teknologi harus disertai dengan program edukasi digital dan subsidi perangkat agar manfaat sistem pembayaran digital dapat dirasakan secara inklusif.

Secara keseluruhan, perkembangan QRIS di Asia mencerminkan dinamika sosial-ekonomi baru, di mana teknologi digital menjadi penghubung antara tujuan pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan sosial, dan integrasi regional. Indonesia, melalui QRIS, tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta model sistem pembayaran yang diakui secara regional, dan perlahan-lahan mengukuhkan posisinya sebagai aktor penting dalam arsitektur keuangan digital Asia Tenggara.

2. Analisis Efek QRIS pada Inklusi Sosial (Akses UMKM, Gender, Kelompok Marginal)

Inklusi sosial merupakan salah satu tujuan utama dari transformasi digital sektor keuangan, di mana setiap individu dan kelompok masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki akses yang setara terhadap layanan keuangan dan peluang ekonomi (Maharani, 2023). Dalam konteks ini, QRIS hadir bukan hanya sebagai solusi teknis dalam sistem pembayaran, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang menjembatani kesenjangan sosial-ekonomi melalui perluasan partisipasi kelompok rentan dalam ekosistem digital.

Salah satu dampak paling nyata dari adopsi QRIS adalah peningkatan aksesibilitas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Fernando, et al., 2023). Sebelum kehadiran QRIS, mayoritas UMKM tidak memiliki akses terhadap sistem pembayaran digital karena mahalnya biaya perangkat EDC (Electronic Data Capture), keterbatasan pengetahuan, serta persyaratan administrasi yang rumit. Dengan QRIS, pelaku UMKM hanya membutuhkan ponsel pintar dan koneksi internet untuk dapat menerima pembayaran secara digital dari berbagai platform, mulai dari dompet digital (e-wallet), mobile banking, hingga aplikasi ride-sharing. Hal ini memungkinkan UMKM memperluas basis pelanggan, meningkatkan efisiensi transaksi, serta terdokumentasi secara sistemik dalam sistem keuangan nasional.

Program *QRIS untuk UMKM* yang digulirkan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan berbagai dinas koperasi dan lembaga perbankan telah berhasil mendaftarkan jutaan UMKM sebagai merchant resmi. Menurut data Bank Indonesia (2024), lebih dari 80% merchant QRIS berasal dari sektor UMKM, menandakan bahwa digitalisasi tidak hanya menguntungkan pelaku usaha besar, tetapi juga memperkuat basis ekonomi rakyat. Implementasi QRIS di pasar tradisional, pedagang kaki lima, dan festival rakyat memperlihatkan bahwa sistem pembayaran ini telah menyentuh akar sosial ekonomi masyarakat secara nyata.

Dari perspektif gender, QRIS juga memberikan peluang yang lebih inklusif bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam aktivitas ekonomi. Di berbagai daerah, perempuan merupakan mayoritas pelaku usaha informal, terutama di sektor kuliner, kerajinan, dan jasa rumah tangga. Dengan QRIS, mereka tidak hanya memperoleh cara yang lebih aman dan efisien untuk menerima pembayaran, tetapi juga ter dorong untuk mencatat pendapatan dan memperbaiki manajemen keuangan usahanya. Hal ini memiliki implikasi positif terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan dan penguatan peran mereka dalam pengambilan keputusan finansial rumah tangga.

QRIS juga berdampak pada kelompok marginal lainnya seperti penyandang disabilitas, lansia, dan komunitas adat terpencil. Melalui kerja sama dengan komunitas dan organisasi masyarakat sipil, beberapa inisiatif inklusif telah dikembangkan, seperti pelatihan QRIS untuk pedagang tunanetra, serta digitalisasi sistem pembayaran di pasar tradisional yang dikelola oleh komunitas lokal. Kendati belum menyentuh semua wilayah secara merata, inisiatif ini menunjukkan arah yang positif bahwa sistem pembayaran digital dapat menjadi medium pemberdayaan sosial jika diimplementasikan secara partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal.

Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam bentuk keterbatasan literasi digital, kepercayaan terhadap sistem digital, serta keterjangkauan perangkat dan infrastruktur. Di sejumlah daerah tertinggal dan kepulauan, sinyal internet yang lemah dan kurangnya pendampingan teknis masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, adopsi QRIS perlu disertai dengan kebijakan afirmatif seperti subsidi perangkat, pelatihan gratis, serta kolaborasi lintas sektor untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses digitalisasi ini.

Dengan demikian, QRIS memiliki potensi kuat sebagai alat inklusi sosial yang menjangkau spektrum masyarakat luas. Ia bukan hanya alat pembayaran, tetapi juga simbol

keterlibatan, keadilan, dan aksesibilitas dalam tatanan ekonomi digital yang sedang dibentuk. Jika didukung oleh ekosistem kebijakan yang responsif, QRIS dapat menjadi jalan tengah antara efisiensi teknologi dan keadilan sosial dalam sistem keuangan nasional dan regional.

3. QRIS sebagai Bentuk Diplomasi Ekonomi Indonesia (Kerja Sama ASEAN, Branding Global)

Dalam era globalisasi dan ekonomi digital, diplomasi tidak lagi terbatas pada pertukaran kebijakan luar negeri yang bersifat konvensional (Saleh, et al., 2025). Negara-negara kini menggunakan teknologi, inovasi, dan sistem digital sebagai bagian dari strategi diplomasi ekonomi untuk memperkuat posisi tawar, memperluas pengaruh, dan membangun kerja sama multilateral yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, Indonesia melalui QRIS telah menampilkan pendekatan baru dalam diplomasi ekonomi yang berbasis pada solusi teknologi nasional yang memiliki daya saing regional.

QRIS, yang awalnya dirancang sebagai sistem pembayaran digital domestik, telah diangkat sebagai bagian dari agenda kerja sama regional ASEAN dalam bidang konektivitas keuangan. Salah satu inisiatif penting adalah ASEAN QR Code Payment Linkage, sebuah kerangka kerja kolaboratif antarnegara Asia Tenggara yang bertujuan untuk memungkinkan transaksi lintas batas secara langsung antarwarga negara melalui kode QR (Zulkifli, et al., 2024). Indonesia, melalui Bank Indonesia, telah menjalin kemitraan dengan otoritas moneter dari Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina untuk mengembangkan interoperabilitas QR code antarnegara. Dengan demikian, wisatawan dari negara-negara tersebut dapat melakukan pembayaran lintas negara tanpa harus menukar uang fisik atau membuka akun lokal, cukup dengan menggunakan aplikasi e-wallet yang mereka gunakan sehari-hari.

Langkah ini bukan hanya meningkatkan efisiensi ekonomi dan kenyamanan wisatawan, tetapi juga menempatkan QRIS sebagai alat diplomasi ekonomi yang konkret. Dalam berbagai forum internasional seperti G20, Indonesia telah menegaskan pentingnya penguatan konektivitas pembayaran lintas batas sebagai bagian dari upaya mewujudkan integrasi ekonomi kawasan. QRIS menjadi manifestasi praktis dari narasi tersebut, sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia bukan hanya konsumen teknologi asing, melainkan juga produsen dan pelopor solusi finansial digital yang dapat dieksport secara konsep dan infrastruktur.

Selain itu, QRIS juga berperan dalam nation branding, yaitu bagaimana Indonesia membangun citra internasional sebagai negara yang progresif dalam transformasi digital. Implementasi QRIS yang cepat dan inklusif di dalam negeri, ditambah dengan ekspansi regionalnya, menjadikan sistem ini sebagai representasi dari semangat inovasi dan kemandirian digital bangsa. Branding ini penting tidak hanya dalam membangun kepercayaan investor dan mitra internasional, tetapi juga dalam menunjukkan bahwa Indonesia mampu berkontribusi aktif dalam arsitektur keuangan regional dan global.

Di tengah dinamika geopolitik dan tekanan dari sistem keuangan berbasis dolar AS, QRIS juga menjadi simbol resistensi dan kedaulatan digital. Dengan mendorong local currency settlement (LCS) yang diintegrasikan dalam sistem QRIS lintas batas, Indonesia bersama negara-negara mitra berupaya mengurangi ketergantungan pada mata uang asing dalam transaksi lintas negara. Fernando dan Turnip (2023) menyatakan bahwa pendekatan ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi memiliki implikasi strategis dalam memperkuat stabilitas moneter kawasan dan membentuk alternatif baru dalam diplomasi keuangan.

Secara keseluruhan, QRIS tidak hanya menjadi instrumen dalam ranah ekonomi domestik, tetapi juga menjadi alat strategis dalam posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah (middle power) di Asia. Diplomasi ekonomi berbasis teknologi seperti QRIS

mencerminkan bahwa kekuatan suatu negara di abad ke-21 tidak lagi ditentukan oleh dominasi militer atau sumber daya alam semata, tetapi oleh kemampuan untuk membangun arsitektur sistemik yang dapat memengaruhi, menghubungkan, dan mengintegrasikan kepentingan antarnegara dalam satu ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks rivalitas keuangan global, dominasi dolar Amerika Serikat dalam sistem keuangan internasional telah lama menjadi salah satu faktor yang menentukan arsitektur moneter global. Ketergantungan negara-negara berkembang terhadap dolar AS dalam transaksi lintas batas tidak hanya meningkatkan risiko volatilitas nilai tukar, tetapi juga mempersempit ruang kedaulatan finansial nasional (Saleh & Marzaman, 2025). Hal ini mendorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk mengembangkan alternatif sistem pembayaran yang lebih mandiri dan berbasis mata uang lokal.

Inovasi sistem pembayaran digital lintas batas melalui QRIS yang terintegrasi dengan skema local currency settlement (LCS) merupakan langkah strategis Indonesia untuk mengurangi eksposur terhadap dominasi dolar AS dalam transaksi regional (Fernando & Turnip, 2023). Kolaborasi lintas negara yang dilakukan Indonesia dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura melalui inisiatif ASEAN QR Code Payment Linkage menjadi bagian dari upaya restrukturisasi arsitektur keuangan kawasan yang lebih inklusif, efisien, dan berdaulat.

Menurut Fernando dan Turnip (2023), interoperabilitas QRIS lintas negara bukan sekadar soal efisiensi transaksi wisatawan, tetapi juga memiliki makna geopolitik sebagai bentuk resistensi terhadap sistem keuangan global berbasis dolar AS. Dalam jangka panjang, perluasan kerja sama QRIS cross-border di Asia Tenggara berpotensi membangun ekosistem regional berbasis mata uang lokal, yang dapat menjadi alternatif signifikan bagi negara-negara berkembang dalam menghadapi ketidakpastian global. Lebih jauh, Saleh dan Marzaman (2025) mencatat bahwa QRIS bersama Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) menjadi simbol kedaulatan digital Indonesia yang secara strategis diposisikan sebagai respons terhadap tekanan ekonomi dan dominasi sistem pembayaran asing, khususnya dari Amerika Serikat. Inisiatif ini memperlihatkan bahwa diplomasi ekonomi digital Indonesia tidak hanya bertujuan memperluas inklusi keuangan, tetapi juga menjadi alat politik ekonomi dalam rivalitas keuangan global.

Dengan demikian, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen transaksi domestik dan regional, tetapi juga sebagai komponen dari strategi Indonesia dalam membangun alternatif sistem keuangan digital global yang lebih berimbang. Ke depan, keberhasilan inisiatif ini di Asia Tenggara dapat menjadi model bagi negara-negara berkembang lain untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang kuat dan platform pembayaran asing, serta memperkuat posisi tawar dalam tatanan ekonomi digital internasional (Fernando & Turnip, 2023; Saleh & Marzaman, 2025).

4. Studi Kasus Implementasi QRIS di Negara Tertentu

Implementasi QRIS sebagai sistem pembayaran lintas batas telah menjadi bagian dari strategi regional Indonesia dalam memperluas jejaring ekonomi digital ASEAN. Studi kasus yang paling menonjol dalam hal ini adalah kerja sama antara Indonesia dan Thailand, yang secara resmi mengoperasikan sistem cross-border QR payment sejak tahun 2022 (Saleh, et al., 2025). Berdasarkan penelitian Maharani (2023), kerja sama ini tidak hanya berhasil membangun interoperabilitas teknis antara dua sistem nasional QRIS dari Indonesia dan PromptPay dari Thailand, tetapi juga menjadi model hukum internasional baru dalam tata kelola sistem pembayaran lintas negara berbasis teknologi.

Secara teknis, kolaborasi ini memungkinkan warga negara Indonesia melakukan pembayaran di Thailand menggunakan aplikasi dompet digital lokal (seperti DANA, OVO, atau GoPay) melalui pemindaian QR PromptPay, dan sebaliknya warga negara Thailand

dapat melakukan transaksi di Indonesia dengan aplikasi mereka sendiri melalui QRIS. Hal ini menyederhanakan proses pembayaran lintas negara, mengurangi kebutuhan pertukaran uang tunai, serta meminimalkan risiko keamanan transaksi. Maharani menekankan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama erat antara Bank Indonesia dan Bank of Thailand, termasuk dalam harmonisasi standar keamanan siber, perlindungan data konsumen, serta skema penyelesaian (*settlement*) lintas mata uang menggunakan *Local Currency Settlement (LCS)*.

Dari sisi diplomasi ekonomi, studi kasus ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran bukan lagi sekadar infrastruktur domestik, melainkan telah menjadi alat negosiasi yang melibatkan prinsip-prinsip hukum internasional dan integrasi kebijakan regional. Implementasi QRIS di Thailand memperlihatkan bagaimana Indonesia secara aktif membentuk tata kelola regional berbasis teknologi yang menjunjung prinsip inklusivitas, kedaulatan digital, dan keadilan ekonomi. Keberhasilan ini kemudian mendorong kerja sama serupa dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina, sebagai bagian dari visi membangun *ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA)* yang sedang dirancang.

Fernando dan Turnip (2023) mencatat bahwa keberadaan QRIS lintas batas ini sangat strategis dalam konteks Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023. Melalui posisi kepemimpinan ini, Indonesia mendorong perluasan interoperabilitas sistem QR code sebagai bagian dari agenda prioritas untuk mendorong konektivitas ekonomi kawasan pasca-pandemi. Tidak hanya memperkuat stabilitas keuangan mikro, kerja sama lintas batas QRIS juga meningkatkan arus wisata dan perdagangan ritel yang lebih efisien, khususnya di wilayah perbatasan dan kota tujuan wisata utama seperti Bali, Phuket, dan Kuala Lumpur.

Sementara itu, tantangan masih terdapat pada aspek harmonisasi regulasi antarnegara, fluktuasi nilai tukar dalam sistem LCS, serta literasi konsumen asing terhadap penggunaan sistem QRIS. Namun demikian, studi kasus ini membuktikan bahwa dengan komitmen politik yang kuat, dukungan teknis dari otoritas moneter, serta kepercayaan antarnegara mitra, sistem pembayaran digital lintas batas dapat diwujudkan secara konkret dan bermanfaat langsung bagi masyarakat luas.

Dengan demikian, implementasi QRIS di negara seperti Thailand menjadi bukti nyata bahwa inovasi teknologi finansial Indonesia memiliki potensi untuk diekspor tidak hanya dalam bentuk produk, tetapi juga sebagai arsitektur kebijakan dan kerja sama regional. Ke depan, keberhasilan studi kasus ini dapat direplikasi di negara-negara lain yang memiliki hubungan dagang erat dengan Indonesia, seperti Vietnam, Laos, hingga negara non-ASEAN seperti Uni Emirat Arab dan Jepang, sehingga memperkuat posisi QRIS sebagai pilar diplomasi ekonomi digital Indonesia di tingkat global.

Perbandingan dengan Model Lain (Alipay, PromptPay)

Dalam upaya menilai posisi strategis QRIS di tingkat regional dan global, penting untuk membandingkannya dengan model sistem pembayaran digital berbasis QR code lain yang telah berkembang lebih dahulu, seperti Alipay (Tiongkok) dan PromptPay (Thailand). Masing-masing sistem ini memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan politik domestik negara asalnya.

Alipay merupakan bagian dari ekosistem keuangan raksasa teknologi Alibaba dan telah menjadi pionir dalam mengintegrasikan pembayaran digital dengan layanan keuangan lainnya seperti pinjaman mikro, asuransi, dan investasi ritel (Srikaningsih, 2020). Keunggulan Alipay terletak pada skalabilitas dan kedalaman layanan berbasis data yang memungkinkan personalisasi layanan keuangan. Namun demikian, sistem ini sangat tertutup secara teknis dan tidak interoperabel dengan sistem dari luar Tiongkok kecuali melalui kerja sama bisnis

bilateral.

Sementara itu, PromptPay dari Thailand dikembangkan oleh otoritas moneter sebagai bagian dari kerangka *Thailand 4.0* dan memiliki kesamaan dengan QRIS dalam hal interoperabilitas dan dukungan pemerintah (Hutagalung, et al., 2021). Kelebihan PromptPay adalah integrasi menyeluruh dengan sistem identitas nasional dan infrastruktur pembayaran real-time (RTGS), yang memungkinkan pembayaran lintas individu berbasis nomor telepon atau ID nasional. Sistem ini menjadi model awal kerja sama lintas batas dengan QRIS, menunjukkan fleksibilitas arsitektur teknis dan komitmen diplomatik kedua negara.

Dibandingkan dengan ketiga model tersebut, QRIS memiliki keunggulan dalam hal desain inklusif, orientasi UMKM, dan ekspansi regional berbasis diplomasi ekonomi. Kelemahan dibanding PromptPay, QRIS belum sepenuhnya terhubung dengan sistem identitas nasional seperti NIK. Meskipun begitu, keberhasilan QRIS dalam membangun interoperabilitas lintas batas menjadi kekuatan utama yang menempatkannya dalam arus besar pembangunan arsitektur sistem pembayaran digital Asia.

Interpretasi Temuan dan Keterkaitannya dengan Teori

Temuan dari hasil penelitian ini secara umum mengonfirmasi bahwa QRIS memainkan peran ganda sebagai instrumen inklusi sosial dan diplomasi ekonomi, sejalan dengan kerangka teoritis yang digunakan. Dalam perspektif teori *diffusion of innovation*, adopsi QRIS menunjukkan karakteristik inovasi yang tinggi (Kurniawati, et al., 2021): keunggulan relatif dibanding sistem konvensional, kompatibilitas dengan perilaku pengguna (UMKM dan masyarakat urban), serta kompleksitas yang rendah karena hanya membutuhkan perangkat sederhana.

Proses penyebaran QRIS, baik secara nasional maupun lintas batas, menggambarkan tahapan adopsi inovasi mulai dari tahap pengetahuan, persuasi, keputusan, pelaksanaan, hingga konfirmasi. Pendorong adopsi ini tidak hanya berasal dari faktor teknologi, tetapi juga institusi, seperti dukungan kuat dari Bank Indonesia dan integrasi QRIS ke dalam program nasional digitalisasi daerah, pelatihan UMKM, dan kerja sama bilateral.

Dalam perspektif teori inklusi keuangan, QRIS menjadi alat strategis untuk memperluas akses layanan keuangan kepada kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan (Setiawan, et al., 2020). QRIS menjangkau UMKM informal, kelompok perempuan, komunitas disabilitas, serta masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) (Munandar, et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa QRIS berperan dalam menurunkan hambatan struktural terhadap akses keuangan, salah satu prinsip utama dalam inklusi keuangan.

Lebih jauh, teori *soft power* dapat digunakan untuk menafsirkan bagaimana QRIS dijadikan alat diplomasi ekonomi (Rukayyah, et al., 2024). Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum regional seperti ASEAN, kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara, serta dorongan terhadap *local currency settlement* melalui QRIS menunjukkan bahwa sistem ini berfungsi sebagai alat pengaruh tanpa paksaan. Indonesia tidak hanya menampilkan kekuatan ekonomi, tetapi juga nilai-nilai seperti inklusivitas, inovasi, dan kedaulatan digital.

Sistem pembayaran digital seperti QRIS juga dapat memperluas inklusi keuangan formal, mendorong transparansi transaksi, dan memberikan peluang ekonomi yang lebih adil bagi komunitas marginal yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan konvensional. Namun demikian, inovasi teknologi digital juga berpotensi menciptakan ancaman baru terhadap human security. Salah satu risiko utama yang muncul adalah terjadinya ketimpangan digital (digital divide), di mana masyarakat yang belum memiliki akses perangkat, konektivitas internet, dan literasi digital yang memadai akan semakin terpinggirkan. Selain itu, ketergantungan sistemik pada infrastruktur digital asing juga menjadi ancaman tersendiri terhadap kedaulatan data dan keamanan informasi pribadi, khususnya apabila infrastruktur sistem pembayaran nasional tidak sepenuhnya dikendalikan oleh otoritas

domestik.

Dengan demikian, QRIS dan inovasi sistem pembayaran digital serupa merupakan alat ganda (dual-edged technology) yang dapat memperkuat atau justru melemahkan dimensi human security, tergantung pada arah kebijakan, sistem regulasi, serta implementasi teknisnya di lapangan (Fernando & Turnip, 2023; Saleh & Marzaman, 2025). Oleh karena itu, kebijakan digitalisasi keuangan nasional dan regional harus secara tegas mempertimbangkan implikasi terhadap aspek human security, agar manfaat sosial-ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara inklusif dan berkeadilan. Interpretasi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan QRIS tidak hanya terletak pada aspek teknis atau administratif semata, melainkan juga pada bagaimana teknologi tersebut mampu dimobilisasi dalam konteks sosial-politik yang lebih luas. QRIS menjadi contoh nyata bahwa inovasi teknologi domestik dapat diangkat menjadi instrumen pembangunan yang berdimensi internasional, memperkuat identitas nasional sekaligus memperluas jangkauan pengaruh negara dalam tatanan digital global.

Sejalan dengan pandangan Al-Fadhat (2022), bahwa keamanan siber bukan hanya soal perlindungan teknis, melainkan juga berkaitan erat dengan penciptaan sistem digital yang aman, transparan, dan mempertimbangkan aspek sosial sebagai mata rantai terlemah dalam ekosistem digital, digitalisasi sistem pembayaran nasional seperti QRIS harus dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga human security digital di tengah rivalitas ekonomi global. QRIS sebagai infrastruktur keuangan digital tidak bisa dilepaskan dari kerangka keamanan siber nasional karena keterlibatannya dalam pengelolaan big data transaksi dan potensi ancaman dari platform global.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa QRIS tidak sekadar berfungsi sebagai sistem pembayaran digital nasional, melainkan juga telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam memperluas inklusi sosial dan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia di kawasan Asia. Digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS berhasil memberikan akses yang lebih luas kepada pelaku UMKM, perempuan, serta kelompok marginal untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi formal melalui sarana transaksi digital yang sederhana, murah, dan aman. Dengan tingkat adopsi yang tinggi dan penetrasi yang merata, QRIS mampu menembus batas sosial-ekonomi yang sebelumnya menjadi penghalang partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan nasional.

Lebih dari itu, QRIS juga menjadi alat diplomasi ekonomi yang relevan dengan konteks kerja sama regional Asia Tenggara. Implementasi cross-border QR payment dengan negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya bermanfaat secara domestik, tetapi juga dapat digunakan sebagai bagian dari strategi integrasi keuangan ASEAN. Dalam kerangka nation branding dan soft power, QRIS mencitrakan Indonesia sebagai negara yang mampu memproduksi solusi teknologi keuangan yang inklusif, interoperabel, dan berdaya saing global.

Temuan penelitian ini memperkuat kerangka teoritis yang digunakan, seperti diffusion of innovation, financial inclusion, soft power dan human securities, yang masing-masing memberikan penjelasan menyeluruh mengenai bagaimana teknologi seperti QRIS dapat diadopsi luas, menjangkau kelompok rentan, dan digunakan sebagai alat pengaruh dalam diplomasi digital. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa QRIS merupakan inovasi teknologi yang memiliki nilai strategis baik dalam memperkuat sistem keuangan nasional maupun dalam membangun posisi Indonesia sebagai kekuatan teknologi menengah di kawasan Asia.

Untuk itu, disarankan agar pemerintah terus memperluas program digitalisasi keuangan secara inklusif, memperkuat kerja sama lintas negara dalam bidang sistem pembayaran, serta mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan fitur-fitur

lanjutan QRIS. Penelitian selanjutnya dapat memperdalam analisis dampak sosial secara kuantitatif atau mengkaji lebih jauh aspek geopolitik dari diplomasi teknologi keuangan di era ekonomi digital.

REFERENSI

- Afandi, A., Rukmana, L., & Wahidah, W. (2022). Efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran non tunai Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dalam mempengaruhi inklusi keuangan mahasiswa. *Banku: Jurnal Bank dan Keuangan*, 3(2).
- Albanjari, F. R. (2023). INKLUSIVITAS FILANTROPI ISLAM Menuju Lembaga Keuangan Sosial Berdaya Saing.
- Djelantik, S., Indraswari, R., Triwibowo, A., & Apresian, S. R. (2015). Komunikasi internasional dalam era informasi dan perubahan sosial di Indonesia. *Research Report-Humanities and Social Science*, 2.
- Fernando, J., & Turnip, E. Y. (2023). Peluang Indonesia sebagai Ketua ASEAN Tahun 2023 dalam mempromosikan penggunaan local currency settlement dan QR code lintas batas terkait transaksi perdagangan di Asia Tenggara. *Jurnal Sentris*, 4(2), 114–134.
- Hamid, A., & Mufraini, M. A. Efek Spasial Capital, Asset Dan Earning Perbankan Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asia (Bachelor's thesis, FEB UIN JAKARTA).
- Harnando, T., Pakpahan, K., & Pakpahan, E. F. (2025). Legal aspects of use of QR codes as a tool of payment in cross countries. *International Journal of Business, Law & Education*, 6(1), 511–520.
- Hirawan, F. B. (Ed.). (2020). Indonesia dan covid-19: pandangan multi aspek dan sektoral. Centre for Strategic and International Studies.
- Huda, M., & Al-Fadhat, F. (2022). *The Political Economy of the US-China Cybersecurity Relations and Trade War Under the Trump Administration*. Journal of Islamic World and Politics, 6(2), 188–206. <https://doi.org/10.18196/jiwp.v6i2.15971>
- Hutagalung, R. A., Nainggolan, P., & Panjaitan, P. D. (2021). Analisis Perbandingan Keberhasilan UMKM Sebelum Dan Saat Menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) Di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(2), 94-103.
- Kurniauwti, E. T., Zuhroh, I., & Malik, N. (2021). Literasi dan edukasi pembayaran non tunai melalui aplikasi QR Code Indonesian Standard (QRIS) pada kelompok milenial. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 5(01).
- Indonesia's efforts in supporting ASEAN digital economy by expanding the use of QRIS in Southeast Asia. (2024). *SHS Web of Conferences*, 204, 02004.
- Maharani, K. R. (2023). *Implementasi kerjasama cross border Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Indonesia-Thailand dalam perspektif hukum internasional* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- MUNANDAR, H., ST, S., & MFM, M. (2024). Optimalisasi Kerja Sama Sektor Keuangan Digital Guna Meningkatkan Ekonomi Makro Dalam Rangka Ketahanan Nasional.
- Nainggolan, E. G. M., Silalahi, B. T., & Sinaga, E. M. (2022). Analisis Kepuasan Gen Z Dalam Menggunakan QRIS Di Kota Pematangsiantar. *Manajemen: Jurnal Ekonomi*, 4(1), 24-32.
- Putri, R. A., Swastiwi, A. W., & Aleksa, N. Z. Z. (2024). Diplomasi Digital Dalam Mengembangkan UMKM Go Global Go Digital di Kepulauan Riau. *Global Political Studies Journal*, 8(1), 70-81.
- Rukayyah, S., Hasanuddin, H., & Syamsul, M. (2024). Analisis pemanfaatan QRIS dalam kemudahan pembayaran digital dan inklusi keuangan UMKM. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 6(2), 324–336.

- Saleh, S. R., & Marzaman, A. P. (2025). Peran QRIS dan GPN sebagai instrumen kedaulatan digital Indonesia dalam menanggapi tekanan dagang Amerika Serikat. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(8), 91–100.
- Setiawan, I. W. A., & Mahyuni, L. P. (2020). QRIS di mata UMKM: eksplorasi persepsi dan intensi UMKM menggunakan QRIS. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(9), 921-946.
- Setiawan, H., & Rahayu, K. (2022). Masa Depan Uang Digital di Indonesia Pasca KTT G 20. Penerbit NEM.
- Srikaningsih, A. (2020). QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0. Penerbit Andi.
- Zulkifli, H. A., & Ramadhani, N. (2024). Dynamic cross-border payment preferences: A case study of QRIS usage among Indonesian travelers. *Banks and Bank Systems*, 19(1), 49–58.
- Badan Ekonomi Kreatif & Data Indonesia. (2025). *Data jumlah pengguna QRIS 3 tahun terakhir hingga Desember 2024*. Data Indonesia. Diakses {tanggal akses}, dari <https://dataindonesia.id/ekonomi-digital/detail/data-jumlah-pengguna-qris-3-tahun-terakhir-hingga-desember-202>
- Badan Ekonomi Kreatif & Data Indonesia. (2025). *Data nilai dan volume transaksi QRIS cross-border inbound hingga Desember 2024*. Data Indonesia. Diakses 20 Juni 2025, dari <https://dataindonesia.id/ekonomi-digital/detail/data-nilai-dan-volume-transaksi-qris-cross-border-inbound-hingga-desember-2024>